

PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM PEMBANGUNAN JALAN DI KECAMATAN SANGKULIRANG KABUPATEN KUTAI TIMUR

Nur Ema Purnama¹, Erwin Resmawan², Budiman³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pekerjaan Umum dalam pembangunan jalan di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur dan untuk mengetahui kendala-kendala Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga dalam melakukan pembangunan jalan di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan atau melukiskan obyek yang di teliti berdasarkan yang ada di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2010:247) dengan beberapa komponen yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum sudah menjalankan perannya dalam pembangunan jalan di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur meliputi merencanakan pembangunan dan merencanakan pembiayaan pembangunan jalan serta memelihara dan meningkatkan pembangunan jalan dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, kontraktor, serta instansi lainnya. Namun demikian Dinas Pekerjaan Umum masih belum optimal dalam menjalankan perannya karena masih terkendala dengan adanya keterlambatan dalam pencairan anggaran, partisipasi masyarakat yang kurang aktif, serta ganti rugi pembebasan lahan yang belum dibayar.

Kata Kunci: Peran, pembangunan, jalan

Pendahuluan

Seiring dengan tuntutan kemajuan serta perkembangan peran dan fungsi pemerintahan di bidang *public service* atau pelayanan public maka untuk mengoptimalkan peran dan fungsi tersebut, pemerintah perlu membentuk susunan organisasi dan tata kerja dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Dalam hal ini Dinas

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: purnamaemma@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pekerjaan Umum merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yakni pekerjaan umum, kehadirannya sangat memberi warna bagi masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum merupakan perangkat daerah yang di serahkan wewenang, tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi dalam bidang pekerjaan umum.

Dalam konteks otonomi daerah yang ditandai dengan kemampuan *self-supporting*-nya organisasi daerah, instansi Dinas Pekerjaan Umum mempunyai peran yang sangat penting sebagai instansi yang melaksanakan dan mengawal pembangunan jalan di daerah. Namun, tidak lupa Dinas Pekerjaan Umum ini memiliki berbagai macam bidang-bidang dan bidang-bidang ini sudah mempunyai tugas masing-masing, salah satunya Bidang Bina Marga. Bidang Bina Marga adalah suatu susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum yang membawahkan seksi perencanaan teknis, seksi jalan, dan seksi jembatan. Untuk itu dalam urusan pembangunan jalan Bidang Bina Marga ikut terlibat dan Bidang inipun berperan penting dalam sebuah perencanaan pembangunan jalan tersebut.

Dengan memperhatikan visi dan misi RPJM maka ditetapkan visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut : **“Terwujudnya Infrastruktur ke PU-an yang handal untuk mendukung Kutai Timur Pusat Agribisnis dan Agroindustri”**. Visi tersebut didasarkan atas pertimbangan yang menggambarkan totalitas yang akan di capai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur dengan penjelasan sebagai berikut : Pembangunan infrastruktur maksudnya mengadakan pembangunan, peningkatan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang ke-PU-an berupa jalan dan jembatan, sarana pemerintahan, air bersih, sanitasi lingkungan, drainase dan yang lainnya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan sosial ekonomi. Adapun misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur antara lain : membangun infrastruktur sumber daya air untuk meningkatkan kualitas sarana pertanian, penyediaan air baku serta mengurangi resiko daya rusak air, membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas antar wilayah yang mencakup kawasan pedesaan dan perkotaan, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana umum dan pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, menyediakan sarana infrastruktur pemukiman yang layak khususnya pada penyediaan jalan lingkungan, drainase, air bersih dan sanitasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kutim, meningkatkan pengelolaan ruang yang mengacu pada dokumen rencana tata ruang dan wilayah, mencegah dan menjaga pemukiman dan lahan dari kebakaran, meningkatkan tata kelola SDM di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum.

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur 5 tahun terakhir ini telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang di capai saat ini dengan yang

direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum. Permasalahan yang terdapat dalam bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum antara lain, masih terdapatnya jalan dalam kondisi rusak berat.

Berdasarkan pengamatan dari penulis tentang jalan di Kecamatan Sangkulirang yang dimana jalan rusak di kecamatan ini memang rusak parah misalkan seperti jalan di Desa Benua Baru Ulu, Iilir, Saka, Sempayau, Maloy dan desa-desa yang lainnya. Memang sejak dulu pembangunan jalan di kecamatan Sangkulirang sudah ada namun belum di tindak lanjuti oleh Dinas Pekerjaan Umum. Masih banyak jalan yang rusak entah itu karena tanahnya basah atau karena kendaraan berat. Di tahun 2011 Dinas Pekerjaan Umum baru mulai lagi melakukan pembangunan jalan walaupun belum maksimal. Mulai dari tahun 2011 tersebut hingga tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum selalu melakukan Pembangunan Jalan di Kecamatan Sangkulirang dan hasilnya cukup bagus. Menurut penulis, di tahun 2016-2017 ini jalan di kecamatan Sangkulirang bisa di bilang bagus dengan Kondisi jalan yang beraspal. Sampai saat ini pun pembangunan jalan masih dilaksanakan namun cenderung terfokus pada anggaran pemerintah karena pembangunan jalan memerlukan investasi atau dana yang cukup besar, belum lagi masih banyaknya terdapat jalan-jalan yang rusak pada ruas-ruas jalan desa saka, susuk, sempayau dan desa lainnya. Berikut adalah data dari Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Pada tahun 2017 tipe permukaan dan kondisi jalan di Kecamatan Sangkulirang adalah 130,81 Km, yang terdiri dari: Jalan Aspal 9,57 Km (7,31 %), Jalan Beton 12,80 Km (9,78 %), Jalan Kerikil 103,74 Km (79,30 %) dan Jalan Tanah 4,71 Km (3.60 %). Berdasarkan kondisi jalan dari panjang jalan yang ada, yang kondisinya baik 48,35 Km (36,96 %), kondisi sedang 56,87 Km (43,47 %), kondisi rusak ringan 11,49 Km (8,78 %), dan Kondisi rusak berat 14,11 Km (10,78 %).

Gambaran diatas memberikan informasi mengenai kondisi jalan kecamatan Sangkulirang yang dimana melihat kondisi tersebut di butuhkan peran atau perhatian khusus oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah Peran Dinas Pekerjaan Umum khususnya di bidang Bina Marga sebagai unsur pelaksanaan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dalam pembangunan salah satunya yaitu pembangunan jalan. Berdasarkan fenomena

diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang sejauh mana **“Peran Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pembangunan Jalan di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur.”**

Kerangka Dasar Teori

Peran

Peran merupakan sekumpulan fungsi yang dapat dilakukan oleh seorang sebagai tanggapan terhadap harapan-harapan daripada anggota penting sistem sosial yang bersangkutan dan harapan-harapannya sendiri serta jabatan yang ia duduki dalam sistem sosial (Pareek, 1985:2). Dalam hal tersebut bila di kaitkan dengan Dinas Pekerjaan Umum, maka Dinas ini sangat berperan penting dalam melakukan pembangunan jalan, salah satu yang sangat diharapkan oleh masyarakat dari Dinas tersebut adalah pembangunan jalan yang baik agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kozier (dalam Sitorus, 2006:133) peran adalah seperangkat tingkah laku yang di harapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang di harapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Organisasi

Pengertian organisasi menurut Gaus (dalam Supardi dan Anwar, 2002:5) yang berjudul Dasar-Dasar Perilaku mengemukakan bahwa Organisasi adalah tata hubungan antara orang-orang untuk dapat memungkinkan terciptanya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Sheldon (dalam Sutarto, 2006:22) organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas sedemikian rupa, memberikan seluruh kemampuan terbaik untuk pemikiran yang efisien, sistematis, positif dan terkoordinasi.

Perencanaan

Perencanaan menurut Suandy (2003:2) secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk menapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Adapun menurut Nawawi (2003:29) perencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar (tolak ukur) keberhasilan suatu kegiatan. Lanjut menurut Nawawi (2003:32) perencanaan adalah kegiatan persiapan dengan merumuskan dan menetapkan keputusan tentang langkah-langkah penyelesaian masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan secara terarah pada satu tujuan. Artinya

bahwa perencanaan dirumuskan untuk memecahkan masalah atau pelaksanaan pekerjaan di lingkungan suatu organisasi/perusahaan.

Pembangunan

Todaro (1993:63) mengatakan bahwa “pembangunan adalah suatu proses yang berdimensi jamak yang melibatkan soal pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial dengan perubahan mendasar tentang kelembagaan, sosial, dan struktur administrasi serta sikap masyarakat dan bahkan dalam banyak hal, kebiasaan dan kepercayaan.” Nugroho (2004:9), pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

Jalan

Adisasmita (2012:79), “Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah atau air serta diatas permukaan air”. Mirsa (2011:54), “dalam suatu kota, pola jaringan jalan biasanya terbentuk melalui proses yang sangat panjang dan merupakan bagian berkelanjutan dari pola yang ada sebelumnya”. Artinya bahwa jalan yang dibangun saat ini merupakan jaringan jalan yang saling berhubungan yang telah direncanakan sejak lama dan bersifat berkelanjutan dari waktu ke waktu.

Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, secara garis besar memiliki tugas dan fungsi sebagai satuan dinas yang menetapkan program, kegiatan, perencanaan dan evaluasi yang terintegrasi dengan rencana pembangunan maupun rencana strategis provinsi serta nasional tentang ke-PU-an yang visioner. Adapun fungsinya ialah :

- a. Penetapan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum;

- c. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pengairan;
- d. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Cipta Karya;
- e. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
- f. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau melukiskan obyek yang diteliti berdasarkan yang ada di lapangan.

Adapun Fokus Penelitian yaitu:

1. Peran Dinas Pekerjaan Umum dalam Pembangunan Jalan di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur indikatornya adalah sebagai berikut:
 - 1) Perencanaan Program Kegiatan Pembangunan Jalan
 - a. Merencanakan Pembangunan Jalan
 - b. Merencanakan Pembiayaan Pembangunan Jalan
 - 2) Penyelenggaraan Pembangunan jalan
 - a. Memelihara Jalan
 - b. Meningkatkan Jalan
2. Kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dalam perencanaan program kegiatan pembangunan jalan dan penyelenggaraan pembangunan jalan di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur.

Hasil Penelitian

Peran Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pembangunan Jalan di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur

Perencanaan Program Kegiatan Pembangunan Jalan

Merencanakan Pembangunan Jalan

Proses perencanaan pembangunan jalan dimulai dari menerima usulan-usulan, terutama dari masyarakat, RT, Kelurahan, Kecamatan lalu ke Dinas Pekerjaan Umum yang akan dibahas langsung pada MUSREMBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang biasanya dilakukan 1 tahun sekali. Hasil dari MUSREMBANG akan diajukan oleh Dinas Pekerjaan Umum ke BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) lalu kemudian akan dibahas bersama BAPPEDA dan hasil dari keputusannya akan dibahas lagi bersama panitia anggaran, dalam susunannya terdiri dari Sekda, Bappeda, Penyusun Program (Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga), keuangan yang diketahui langsung oleh SEKDA (Sekertaris Daerah), setelah dibahas dan dipilih-pilih program mana yang terlebih dahulu diprioritaskan kemudian RKA

diajukan sekda kepada DPR untuk memperoleh penetapan dan pengesahan sebuah anggaran oleh DPRD.

Masyarakat juga ikut terlibat dalam merencanakan pembangunan jalan, keterlibatan masyarakat yaitu berupa memberikan usulan-usulan dalam rapat MUSREMBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan). Dinas Pekerjaan Umum Bidang Marga juga dilibatkan dalam rangka untuk menerima usulan dan RT, Kelurahan hingga Kecamatan lalu dari usulan tersebut dibuat menjadi rencana pembangunan yang akan dilakukan, lalu dari rencana tersebut Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga mengajukan hasil rencana ke BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), sebagai badan perencanaan pembangunan daerah atau biasa di sebut BAPPEDA dilibatkan dalam hal pembahasan perencanaan pembangunan yang dilakukan, adapaun dalam pembahasan tersebut juga terlibat SEKDA (Sekertaris Daerah), lalu apabila semua sudah selesai dibahas bersama dan mencapai suatu kesepakatan maka tahap selanjutnya menyerahkan perencanaan pembangunan ke pada pemerintah seperti DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), keterlibatan DPRD ialah untuk mendapatkan penetapan dan pengesahan anggaran, maka itulah pihak-pihak yang terkait dalam melakukan sebuah perencanaan pembangunan jalan yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga.

Merencanakan pembangunan jalan merupakan suatu tahapan awal sebelum pelaksanaan pembangunan jalan dilakukan karena dalam sebuah proses pembangunan diperlukannya suatu perencanaan program pembangunan yang dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta tepat sasaran dalam pembangunan, agar pembangunan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sesuai dengan pendapat Riyadi dan Bratakusumah (2005:6) yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Adapun menurut Sjafrizal (2009:15) mengatakan bahwa perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan.

Suatu pembangunan yang akan dilaksanakan harus di rencanakan terlebih dahulu, agar dapat mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan jalan tersebut, termasuk kegiatan-kegiatan yang ada didalamnya. Para perencana selalu ingin mencari metode yang dapat meningkatkan kualitas perencanaan dalam menghadapi jumlah kegiatan pembangunan yang semakin bertambah, salah satunya dengan penjadwalan yang baik. Penjadwalan menentukan kapan kegiatan-kegiatan akan dimulai dan diselesaikan, sehingga pengendalian sumber daya akan disesuaikan waktunya menurut kebutuhan yang telah ditentukan. Dalam perencanaan pembangunan jalan, penjadwalan merupakan hal yang sangat penting.

Merencanakan Pembiayaan Pembangunan Jalan

Mengenai perencanaan pembangunan jalan berawal dari suatu Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang berarti bahwa Dinas Pekerjaan Umum Khususnya di Bidang Bina Marga merencanakan suatu pembiayaan pembangunan jalan antara lain dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan di tetapkan dengan undang-undang, selanjutnya melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) maksudnya adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan di tetapkan dengan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4578), selanjutnya dari Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina marga serta bantuan dari pemerintah dalam menyediakan fasilitas-fasilitas pelengkap, dan bantuan dari perusahaan swasta yang menggunakan akses jalan tersebut. Adapun yang terlibat dalam perencanaan pembiayaan pembangunan jalan tersebut antara lain: Pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum, Bidang Bina Marga, Jawatan (khusus bangunan negara), Perencana, Kontraktor, instansi lainnya.

Merencanakan pembiayaan pembangunan jalan merupakan hal yang sangat penting setelah merencanakan pembangunan jalan. Merencanakan pembiayaan pembangunan jalan merupakan perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat dan upah, serta biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan. Anggaran biaya pada pembangunan akan berbeda-beda di masing-masing daerah, hal ini disebabkan karena perbedaan harga satuan bahan dan upah tenaga kerja. Ada dua faktor yang berpengaruh dalam merencanakan suatu pembiayaan pembangunan jalan yaitu faktor teknis dan non teknis. Faktor teknis antara lain berupa ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam sebuah pelaksanaan pembangunan serta gambar-gambar konstruksi pembangunan. Sedangkan non teknis berupa harga-harga bahan pembangunan jalan dan upah tenaga kerjanya.

Dalam menyusun anggaran biaya, terlebih dahulu perlu diketahui untuk keperluan apa dan kapan anggaran biaya tersebut dibuat, karena hal ini akan berpengaruh pada sistem penyusunan dan hasil yang diharapkan. Penyusun anggaran biaya terdiri dari instansi, dinas, jawatan (khusus bangunan negara), perencana dan kontraktor.

Ada dua jenis penyusunan anggaran biaya, yaitu :

1. Estimasi Biaya Kasar, yaitu penaksiran biaya secara global dan menyeluruh yang dilakukan sebelum rancangan bangunan dibuat.
2. Perhitungan Anggaran Biaya, yaitu penghitungan biaya secara detail dan terinci sesuai dengan perencanaan yang ada.

Sesuai dengan pendapat Sabeni (2001:3) yang menyatakan bahwa anggaran adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu. Artinya bahwa anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi untuk jangka waktu yang tertentu dan pada umumnya dinyatakan dalam satuan uang, namun dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa.

Penyelenggaraan Pembangunan Jalan Memelihara Jalan

Bentuk pemeliharaan jalan seperti melihat laporan progres fisik di lapangan atau bisa disebut sebagai laporan mingguan, laporan mingguan proyek merupakan sebuah pertanggung jawaban dalam bentuk tertulis mengenai kegiatan yang sudah di jalankan selama satu minggu untuk kemudian di tuangkan dalam bentuk tertulis, laporan mingguan ini dibuat oleh kontraktor atau konsultan pengawas untuk diberikan kepada owner atau pemilik proyek. Dengan adanya laporan ini maka proses pelaksanaan pekerjaan dapat diarsipkan. Sebelum membuat laporan mingguan proyek maka terlebih dahulu dibuat laporan harian proyek yang merupakan laporan per-hari mengenai pekerjaan yang sedang dilaksanakan, dari 7 laporan harian proyek tersebut maka dapat dibuat rekap selama satu minggu kerja dalam bentuk laporan mingguan. dengan adanya laporan ini akan mempermudah Kepala Bidang Bina Marga dalam melihat pemeliharaan jalan yang dilakukan.

Pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Bidang Bina Marga yaitu melalui perbaikan jalan yang rusak, melakukan peninjauan disetiap alokasi kerusakan jalan, melakukan koordinasi dengan camat dan melakukan kerja sama dengan masyarakat dalam pemeliharaan jalan, artinya bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga selalu melibatkan masyarakat dalam pemeliharaan jalan, karena jalan tersebut akan digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dengan berdagang ataupun berbisnis. Pemeliharaan jalan dapat dilakukan dengan tiga tahapan yaitu :

1. Pemeliharaan rutin merupakan kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan yang mantap. Pemeliharaan rutin hanya diberikan terhadap lapis permukaan yang sifatnya untuk meningkatkan kualitas berkendara.
2. Pemeliharaan berkala merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
3. Rehabilitas merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan.

Berdasarkan laporan tahunan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga, adapun pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Bidang Bina Marga yaitu seperti melakukan pemeliharaan pada jalan desa-desa Kecamatan Sangkulirang dan melakukan pemeliharaan jalan dalam ibukota Kecamatan Sangkulirang jalan Imam Bonjol, Panglima Batur, R.A Kartini, M. Yamin serta pemeliharaan jalan menuju SDN 012, dan SDN lainnya yang berada di Kecamatan Sangkulirang, dan pemeliharaan yang dilakukan kondisi fisiknya sudah mencapai 95% berdasarkan laporan.

Meningkatkan Jalan

Bentuk peningkatan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga antara lain dengan memperbaiki kondisi jalan berupa perkerasan jalan dengan campuran antara agregat dan bahan pengikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas dan perkerasan jalan dapat dibagi menjadi dua yaitu perkerasan jalan lentur menggunakan bahan ikat aspal yang sifatnya lentur terutama pada saat panas dan perkerasan jalan kaku menggunakan bahan ikat aspal yang sifatnya kaku berupa plat beton dengan atau tanpa tulangan, selanjutnya pelebaran jalan dengan melakukan pekerjaan galian untuk pelebaran badan jalan yang mencakup pekerjaan penanganan, pembuangan atau penumpukan dengan tanah atau batu atau bahan lain yang ada di sekitarnya, selanjutnya melakukan semenisasi atau pengaspalan jalan dengan menutup jalan yang berlubang.

Pekerjaan peningkatan jalan adalah pekerjaan yang ditujukan untuk menambah kemampuan struktur jalan ke Muatan Sumbu Tunggal (MST) yang lebih tinggi atau menambah kapasitas jalan. Program dalam peningkatan jalan terdiri atas:

1. Peningkatan struktur merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas-ruas jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.
2. Peningkatan kapasitas merupakan kegiatan penanganan jalan dengan pelebaran, perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah lajur.

Kendala-Kendala yang di hadapi Dinas Pekerjaan Umum dalam Perencanaan Program Kegiatan Jalan dan Penyelenggaraan Pembangunan Jalan

Anggaran

Anggaran menjadi kendala utama karena adanya lahan pembangunan jalan yang masih belum dibebaskan dan terkendala masalah anggaran yang belum cair. Anggaran tersebut untuk ganti rugi lahan yang akan dilakukan pembangunan jalan misalkan seperti pelaksanaan pembangunan jalan Hasanuddin dan jalan Ibukota Kecamatan Sangkulirang. Dalam melakukan pelaksanaan pembangunan ada pembangunan yang masih 50% antara lain peningkatan jalan Ibukota

Kecamatan Sangkulirang (Benua Baru Ulu), peningkatan jalan Desa Peridan menuju Desa Tanjung Manis, peningkatan jalan Susuk – Perupuk, peningkatan jalan Benua Baru Ilir Kecamatan sangkulirang, peningkatan jalan Imam Bonjol Desa Benua Baru Ulu, peningkatan jalan Gatot Subroto Desa Benua Baru Ilir, peningkatan jalan Desa Saka menuju Desa Perupuk, dan peningkatan jalan Desa Susuk Dalam yang dimana pelaksanaan pembangunan jalan-jalan tersebut masih 50% artinya bahwa pembangunan jalan tersebut belum bisa diselesaikan seluruhnya dikarenakan dalam menjalankan pelaksanaan pembangunan jalan tersebut terjadi pada realisasi anggaran, hal tersebut merupakan kendala yang sering terjadi di setiap pengusulan atau perencanaan anggaran. Sehingga Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga memilih-milih mana yang duluan harus dibangun karena pembangunan harus disesuaikan dengan anggaran yang sudah ada. Anggaran pembangunan jalan disesuaikan dengan master plan atau bisa juga disebut dengan perencanaan pembangunan, perencanaan pembangunan tersebut akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga. Tetapi dalam pelaksanaan pembangunan jalan ada yang menjadi kendala yaitu anggaran. Anggaran menjadi kendala utama dalam setiap pengusulan ataupun perencanaannya, dalam arti anggaran yang belum cair terkadang menjadi kendala dalam program pembangunan seperti pembebasan lahan dan pemilihan yang mana duluan dikerjakan dalam program pembangunan jalan, dengan anggaran yang terkadang tidak sepenuhnya cair sehingga Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga dalam melakukan program pembangunan jalan harus dapat memilih-milih pelaksanaan pembangunan yang mana lebih dahulu dibangun karena pembangunan dilakukan harus berdasarkan sumber anggaran yang ada. Dengan melakukan pemilihan tersebut maka ada program pembangunan yang masih 50% seperti peningkatan jalan Ibukota Kecamatan Sangkulirang, peningkatan jalan Desa Peridan menuju Desa Tanjung Manis, peningkatan jalan Susuk – Perupuk, peningkatan jalan Benua Baru Ilir Kecamatan sangkulirang, peningkatan jalan Imam Bonjol Desa Benua Baru Ulu, peningkatan jalan Gatot Subroto Desa Benua Baru Ilir, peningkatan jalan Desa Saka menuju Desa Perupuk, dan peningkatan jalan Desa Susuk Dalam. Pelaksanaan pembangunan jalan-jalan tersebut masih 50% dan terkendala karena anggaran yang sudah cair namun harus di pilah-pilah yang mana yang lebih duluan dilakukan pembangunan karena anggaran yang diusulkan tidak sepenuhnya cair. Tetapi meski anggaran tidak sepenuhnya cair upaya Dinas Pekerjaan Umum Bidang Marga dalam membangun serta meningkatkan jalan tidak akan berhenti karena anggaran.

Partisipasi Masyarakat

Masyarakat sangat mendukung perencanaan pembangunan jalan Ibukota Kecamatan Sangkulirang, dan pembangunan jalan tersebut sedang dalam tahapan peningkatan. Masyarakat yang bisa diajak bekerja sama atau mendukung kegiatan pembangunan jalan akan sangat berdampak positif dalam pelaksanaan

pembangunan, tetapi sebaliknya adapun masyarakat yang tidak mendukung dan hal ini dapat menimbulkan masalah dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat itu sangat penting dalam melakukan pembangunan, misalkan masyarakat yang memberi usulan pembangunan dalam MUSREMBANG yang dilakukan oleh masyarakat, dengan adanya usulan tersebut maka akan menjadi perencanaan yang kemudian dilakukan pembangunan jalan karena seperti yang kita ketahui pembangunan itu ditunjukkan kepada masyarakat, jadi masyarakat harus ikut berpartisipasi di dalamnya. Tetapi apabila masyarakat tidak mendukung maka akan banyak menimbulkan masalah seperti masyarakat yang tidak mau membebaskan lahannya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang tidak ikut dalam berpartisipasi atau adanya masyarakat yang kurang aktif dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada.
2. Jenis kelamin.
3. Pendidikan, dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi.
4. Pekerjaan dan penghasilan.
5. Lamanya tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang.

Itulah faktor-faktor penghambat seseorang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang ada dilingkungannya sendiri.

Pembebasan Lahan

Berikut adalah beberapa permasalahan dalam pembebasan lahan diantaranya :

1. Masalah tumpang tindihnya kepemilikan tanah;
2. Masalah tanah yang terlantar;
3. Masalah kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan lahan;
4. Masalah kesulitan mengurus sertifikat tanah;
5. Masalah ganti rugi tanah.

Namun, dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan Pembebasan lahan hanya terdapat pada permasalahan ganti rugi tanah yang belum dibayar. Pembebasan lahan menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan jalan terutama permasalahannya terdapat pada ganti rugi tanah.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Perencanaan Program Kegiatan Pembangunan Jalan (merencanakan pembangunan jalan dan merencanakan pembiayaan pembangunan jalan) dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum melalui MUSREMBANG dengan berbagai pihak yang terkait seperti Sekda, DPR, DPRD, BAPPEDA dan lain

sebagainya. Setelah dilakukan tahap-tahap tersebut dan disetujui tim asistensi/verifikasi, maka perencanaan yang dibuat akan dimulai di lapangan. Selanjutnya merencanakan pembiayaan pembangunan jalan yang disusun dalam RAB (Rancangan Anggaran Biaya) antara lain dari APBN, APBD, DPU Bidang Bina Marga, bantuan dari pusat serta dari perusahaan swasta, dengan melibatkan pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum, Bidang Bina Marga, Kontraktor, serta instansi lainnya.

2. Penyelenggaraan Pembangunan Jalan dilakukan melalui Pemeliharaan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum yang meliputi memperbaiki jalan dengan menambal maupun merehab total apabila kondisi jalan rusak yang dilakukan secara berkesinambungan, serta meningkatkan jalan yang dilakukan melalui perkerasan jalan, pelebaran jalan, pengaspalan, semenisasi, serta menambah bangunan pelengkap pada jalan.
3. Adapun kendala-kendala yang menghambat peran Dinas Pekerjaan Umum antara lain : anggaran yang terlambat pencairannya, partisipasi masyarakat yang kurang aktif, serta ganti rugi pembebasan lahan yang belum dibayar.

Saran

1. Dalam perencanaan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum harus bisa menerima masukan dari masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam melakukan perencanaan pembangunan khususnya jalan.
2. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan, hendaknya pemerintah selalu mengadakan kegiatan yang mengikutsertakan perangkat desa dan masyarakat desa secara menyeluruh, selain itu diharapkan pemerintah dapat meningkatkan alokasi dana tiap tahunnya, sehingga akan menjadi keberhasilan pembangunan desa.
3. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan ganti rugi pembebasan lahan yang belum dibayar dan sebaiknya pemerintah menentukan harga dengan melihat NJOP, sehingga harga tanah akan disesuaikan dengan lokasi dan kondisi tanah.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Sakti Adji, 2012. *Perencanaan Pembangunan Transportasi* Yogyakarta : PT. Graha Ilmu.
- Mirsa, Renaldi, 2011. *Elemen Tata Ruang Kota*. Lhokseumawe : Graha Ilmu.
- Nawawi, 2003. *Perencanaan Sumber Daya Manusia Untuk Organisasi Profesi Yang Kompetitif*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, Iwan dan Rochmin Dahuri, 2004. *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta : LP3ES.
- Sitorus M, 2006. *SOSIOLOGI 2*. Jakarta : Gora Angkasa.
- Suandy, Erly, 2003. *Perencanaan Pajak (Edisi Revisi)*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Supardi dan Anwar Syaiful, 2002. *Dasar-Dasar Prilaku Organisasi*. Jogjakarta: UUI Press Jogjakarta (anggota IKAPI).

Sutarto, 2006. *Dasar-Dasar Organisasi*. Jogjakarta : Gadjah Mada Universit Press.

Todaro, Michael, P. 1993. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta :Erlangga.

Dokumen-dokumen:

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten KutaiTimur,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan,